



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Barito Utara.
7. Dana Bagi Hasil Merata yang selanjutnya disebut DBH Merata adalah DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Pemerintah Desa dengan besaran yang sama tanpa memperhitungkan besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah dan Pelayanan Publik Dasar.
8. Dana Bagi Hasil Proporsional yang selanjutnya disebut DBH Proporsional adalah DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh Pemerintah Desa berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari wilayah masing-masing dengan tujuan untuk

memberikan insentif atas kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan transparansi dalam pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa secara merata dan berkeadilan yang digunakan untuk memajukan dan menyejahterakan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.722.417.163,30,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh sen).
- (3) Alokasi DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.636.487.539,50,- (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah lima puluh sen).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (5) Ketentuan mengenai Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil

penjumlahan antara DBH Merata dan DBH Proporsional, dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa.
- (7) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan antara nilai bobot Desa dikalikan dengan nilai pagu DBH Proporsional, dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data Realisasi Pembayaran Pajak PBB-P2 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai rincian besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa

Pasal 7

Mekanisme Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan Dana

Pasal 8

- (1) DBH dan Retribusi Daerah yang diterima Desa diprioritaskan untuk penggunaan pada :
 - a. Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar Desa;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan Desa; dan
 - d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari DBH dan Retribusi Daerah, penggunaannya harus mengacu pada hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat.
- (3) Penggunaan SILPA harus menjamin kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat Desa dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. realisasi penggunaan dana;
 - b. keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk :
 - a. memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menjamin efektifitas penggunaan dana; dan
 - c. menjamin akuntabilitas penggunaan dana.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi kepada aparat dan masyarakat Desa;
 - b. bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan dana;
 - c. pelatihan kapasitas aparat Desa; dan/atau
 - d. pendampingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pembinaan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila di perlukan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan penggunaan dana;
 - b. pelaksanaan penggunaan dana;
 - c. pelaporan penggunaan dana; dan
 - d. pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi;
 - b. verifikasi lapangan;
 - c. audit; dan/atau
 - d. penilaian kinerja.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati dapat mengeluarkan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan kerugian daerah, dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}$$

Keterangan :

- DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa
- DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata yang diterima Desa
- DBH Proporsional : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULA DBH PROPORSIONAL UNTUK SETIAP DESA

$$\text{DBH Proporsional}_x = \text{BD}_x \times \text{DBH Proporsional}$$

Keterangan :

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai Desa untuk setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN



Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Perubahan Tahun Anggaran 2026

No	Nama Kecamatan / Desa	Empatpersen 4%	Tahun Pajak Daerah (DBH PD)			Tahun Retribusi Daerah (DBH RD)			Total 40%	DBH PD	DBH RD	DBH PD	DBH RD	Tahun Pembiayaan		
			60%	40%	100%	60%	40%	100%						100%	40%	100%
			DBH PD	DBH PD	DBH PD	DBH RD	DBH RD	DBH RD						DBH PD	DBH RD	DBH RD
			3.432.450.267,98	2.288.960.865,24	5.721.417.162,40	981.862.333,70	654.596.915,80	1.636.459.249,50		4.415.312.018,68	1.636.459.249,50	4.415.312.018,68	1.636.459.249,50	4.415.312.018,68	1.636.459.249,50	1.636.459.249,50
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Jumlah Kec. Manglad	1. Sikar	26.363,726	36.018.820,41	11.118.467,20	48.037.768	10.557.984,13	3.179.778,925	13.737.762,6213	14.268.729,60	47.476.804,53	14.268.729,60	47.476.804,53	14.268.729,60	47.476.804,53	14.268.729,60	47.476.804,53
		3.697.554	36.018.820,41	5.223.750,12	43.142.571	10.557.984,13	1.779.857,436	12.337.842,0472	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57	55.480.412,57
		2.060.076	36.018.820,41	7.046.447,06	43.065.267	10.557.984,13	2.013.121,436	12.570.115,604	9.060.578,43	47.476.804,53	9.060.578,43	47.476.804,53	9.060.578,43	47.476.804,53	9.060.578,43	47.476.804,53
		1.343.263	36.018.820,41	4.256.267	47.321.530	10.557.984,13	1.624.527,0374	12.180.511,7429	7.290.130,17	47.476.804,53	7.290.130,17	47.476.804,53	7.290.130,17	47.476.804,53	7.290.130,17	47.476.804,53
		1.866.700	36.018.820,41	5.073.602,55	42.394.339	10.557.984,13	4.880.768,7422	15.438.753,4868	21.047.684,41	47.476.804,53	21.047.684,41	47.476.804,53	21.047.684,41	47.476.804,53	21.047.684,41	47.476.804,53
		5.675.523	36.018.820,41	17.066.915,69	53.085.736	10.557.984,13	9.110.864,0931	19.751.863,0254	41.342.831,17	47.476.804,53	41.342.831,17	47.476.804,53	41.342.831,17	47.476.804,53	41.342.831,17	47.476.804,53
		10.690.677	36.018.820,41	32.148.931,97	69.097.752	10.557.984,13	69.097.752	19.751.863,0254	101.950.594,21	47.476.804,53	101.950.594,21	47.476.804,53	101.950.594,21	47.476.804,53	101.950.594,21	47.476.804,53
		64.537.275	36.018.820,41	76.276.594,80	360.791.517,45	69.097.752	22.671.926,41	86.010.868,16	284.860.837,21	47.476.804,53	284.860.837,21	47.476.804,53	284.860.837,21	47.476.804,53	284.860.837,21	47.476.804,53
		2.372.712	36.018.820,41	7.736.425,12	44.655.945,53	10.557.984,13	2.212.450,6587	12.770.404,815	5.948.875,38	47.476.804,53	5.948.875,38	47.476.804,53	5.948.875,38	47.476.804,53	5.948.875,38	47.476.804,53
		1.445.184	36.018.820,41	4.345.925,95	41.263.690,06	10.557.984,13	1.262.812,4115	11.860.796,973	5.588.937,79	47.476.804,53	5.588.937,79	47.476.804,53	5.588.937,79	47.476.804,53	5.588.937,79	47.476.804,53
II. Jumlah Kec. G. Tembak	7. Fatawa	2.163.845	36.018.820,41	5.746.917,53	43.425.737,04	10.557.984,13	1.890.837,0777	12.418.821,8605	8.367.755,21	47.476.804,53	8.367.755,21	47.476.804,53	8.367.755,21	47.476.804,53	8.367.755,21	47.476.804,53
		086.132	36.018.820,41	2.965.436,30	39.884.226,71	10.557.984,13	848.092,0944	11.409.026,1902	3.813.446,57	47.476.804,53	3.813.446,57	47.476.804,53	3.813.446,57	47.476.804,53	3.813.446,57	47.476.804,53
		2.133.280	36.018.820,41	5.415.005,25	43.330.825,96	10.557.984,13	1.814.552,7527	12.392.026,8785	7.476.804,53	47.476.804,53	7.476.804,53	47.476.804,53	7.476.804,53	47.476.804,53	7.476.804,53	47.476.804,53
		3.929.370	36.018.820,41	11.846.114,54	48.703.934,93	10.557.984,13	3.387.732,5439	13.945.716,0978	15.233.847,09	47.476.804,53	15.233.847,09	47.476.804,53	15.233.847,09	47.476.804,53	15.233.847,09	47.476.804,53
		28.442.864	36.018.820,41	86.733.652,72	123.652.453,11	10.557.984,13	24.893.963,0106	35.361.927.1364	111.537.575,73	47.476.804,53	111.537.575,73	47.476.804,53	111.537.575,73	47.476.804,53	111.537.575,73	47.476.804,53
		1.410.101	36.018.820,41	4.240.527,25	41.136.147,01	10.557.984,13	1.212.941,8906	11.770.903,0094	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53
		740.136	36.018.820,41	2.425.669,54	39.144.489,55	10.557.984,13	936.466,3511	11.194.477.4770	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53	2.802.152,40	47.476.804,53
		7.0664	36.018.820,41	18.024,01	36.926.845,02	10.557.984,13	5.154.488	10.763.138,7746	3.313.530,30	47.476.804,53	3.313.530,30	47.476.804,53	3.313.530,30	47.476.804,53	3.313.530,30	47.476.804,53
		856.960	36.018.820,41	2.379.272,03	36.926.845,02	10.557.984,13	796.988,6947	11.494.943,9835	1.262.831,10	47.476.804,53	1.262.831,10	47.476.804,53	1.262.831,10	47.476.804,53	1.262.831,10	47.476.804,53
		1.041.044	36.018.820,41	933.363,18	37.854.165,29	10.557.984,13	267.487,9183	10.835.47.10441	6.187.910,99	47.476.804,53	6.187.910,99	47.476.804,53	6.187.910,99	47.476.804,53	6.187.910,99	47.476.804,53
III. Jumlah Kec. G. Jura	23. Tanjung Baran	1.680.152	36.018.820,41	4.811.831,39	41.790.051,71	10.557.984,13	1.376.076,9784	11.904.063,8692	48.819.630,53	47.476.804,53	48.819.630,53	47.476.804,53	48.819.630,53	47.476.804,53	48.819.630,53	47.476.804,53
		12.623.651	36.018.820,41	37.960.093,13	74.879.513,24	10.557.984,13	10.855.931,3167	13.595.197.0829	11.522.742,86	47.476.804,53	11.522.742,86	47.476.804,53	11.522.742,86	47.476.804,53	11.522.742,86	47.476.804,53
		3.466.860	36.018.820,41	10.515.559,09	47.434.439,41	10.557.984,13	3.057.413,8562	13.595.197.0829	5.448.552,80	47.476.804,53	5.448.552,80	47.476.804,53	5.448.552,80	47.476.804,53	5.448.552,80	47.476.804,53
		1.408.660	36.018.820,41	4.226.899,14	41.153.716,25	10.557.984,13	1.211.664,0570	11.769.944.7828	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53
		15.734.016	36.018.820,41	104.070.515,53	789.771.739,86	10.557.984,13	36.466.667,86	24.427.743,66	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53	24.427.743,66	47.476.804,53
		2.169.160	36.018.820,41	6.342.431,83	43.261.312,24	10.557.984,13	1.813.811,438	12.371.799,61	8.136.307,61	47.476.804,53	8.136.307,61	47.476.804,53	8.136.307,61	47.476.804,53	8.136.307,61	47.476.804,53
		5.032.676	36.018.820,41	15.133.804,74	52.052.625,11	10.557.984,13	4.327.901,86	14.885.929,95	19.461.745,26	47.476.804,53	19.461.745,26	47.476.804,53	19.461.745,26	47.476.804,53	19.461.745,26	47.476.804,53
		116.102	36.018.820,41	346.131,26	37.267.051,76	10.557.984,13	99.844,02	10.637.828,14	448.923,37	47.476.804,53	448.923,37	47.476.804,53	448.923,37	47.476.804,53	448.923,37	47.476.804,53
		666.637	36.018.820,41	2.880.82	36.921.707,33	10.557.984,13	855,57	10.558.809,10	47.480.516,93	47.476.804,53	47.480.516,93	47.476.804,53	47.480.516,93	47.476.804,53	47.480.516,93	47.476.804,53
		4.213.063	36.018.820,41	1.853.435,27	38.752.345,68	10.557.984,13	524.319,97	11.082.304,10	2.337.745,24	47.476.804,53	2.337.745,24	47.476.804,53	2.337.745,24	47.476.804,53	2.337.745,24	47.476.804,53
IV. Jumlah Kec. Teweh Jura	34. Sampang I	2.382.512	36.018.820,41	7.164.473,01	43.086.293,82	10.557.984,13	3.023.039,76	12.676.808,45	4.837.531,04	47.476.804,53	4.837.531,04	47.476.804,53	4.837.531,04	47.476.804,53	4.837.531,04	47.476.804,53
		1.245.781	36.018.820,41	3.746.199,12	40.695.019,53	10.557.984,13	1.071.331,92	11.926.310,05	63.038,01	47.476.804,53	63.038,01	47.476.804,53	63.038,01	47.476.804,53	63.038,01	47.476.804,53
		24.056	36.018.820,41	72.348,03	36.991.166,44	10.557.984,13	20.680,97	10.578.674,10	52.242.843,88	47.476.804,53	52.242.843,88	47.476.804,53	52.242.843,88	47.476.804,53	52.242.843,88	47.476.804,53
		0	36.018.820,41	0,00	36.918.820,41	10.557.984,13	0,00	10.557.984,13	60.844.951,25	47.476.804,53	60.844.951,25	47.476.804,53	60.844.951,25	47.476.804,53	60.844.951,25	47.476.804,53
		53.424.964	36.018.820,41	47.113.809,27	453.420.423,87	10.557.984,13	15.530.751,88	12.676.808,45	12.416.588,09	47.476.804,53	12.416.588,09	47.476.804,53	12.416.588,09	47.476.804,53	12.416.588,09	47.476.804,53
		3.210.836	36.018.820,41	0.655.983,25	46.274.181,96	10.557.984,13	2.763.225,14	13.319.292,37	1.641.056,09	47.476.804,53	1.641.056,09	47.476.804,53	1.641.056,09	47.476.804,53	1.641.056,09	47.476.804,53
		701.044	36.018.820,41	1.569.480,26	38.426.220,67	10.557.984,13	431.955,83	10.981.616,05	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.804,53	47.476.8

46	Letto I	0	0,00	36 918 820,41	35 406 463,87	36 918 820,41	10 557 984,13	0,00	10 557 984,13	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81
47	Letto II	11 774 454	1,55	36 918 820,41	66 271 694,13	103 190 514,54	18 755 281,27	20 580 265,99	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
48	Petiruh	21 028 042	2,90	36 918 820,41	41 327 905,12	10 557 984,13	1 183 521,47	29 510 255,27	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
49	Kidul Sari	1 376 941	0,18	36 918 820,41	2 940 690,60	10 557 984,13	840 948,19	11 398 042,21	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
50	Sel. Kibayuh I	977 883	0,13	36 918 820,41	1 361 765,62	10 557 984,13	380 443,43	10 947 427,50	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
51	Sel. Kibayuh II	452 858	0,06	36 918 820,41	18 025 765,62	10 557 984,13	5 151 979,03	15 712 823,16	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
52	Keruing Raya	5 664 884	0,79	36 918 820,41	6 398 413,02	10 557 984,13	1 801 219,10	12 350 194,20	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
53	Indah Mudi	2 694 308	0,38	36 918 820,41	134 442 636,93	420 793 199,40	84 463 820,01	122 911 559,19	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
Jumlah														
54	Jumlah Kcs. Jabat	17 741 380	0,02	36 918 820,41	373 338,98	47 476 804,53	106 760,76	10 664 750,89	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
55	Ipri	1 241 152	0,45	36 918 820,41	10 623 987,11	47 476 804,53	2 961 019,37	13 510 000,50	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
56	Motok	3 443 170	0,45	36 918 820,41	6 081 582,45	43 600 402,89	1 910 784,99	12 408 772,16	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
57	Mura Bawah	2 221 939	0,28	36 918 820,41	6 409 108,15	43 627 088,89	1 813 883,65	12 408 772,16	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
58	Taji Batu	2 111 319	0,21	36 918 820,41	16 302 832,15	53 241 653,79	2 369 297,32	13 240 297,85	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
59	Mura Atas	3 421 431	0,21	36 918 820,41	8 146 886,47	45 065 703,87	1 611 091,09	11 589 037,18	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
60	Penangin	2 709 299	0,30	36 918 820,41	1 065 388,24	40 524 298,65	3 070 648,83	10 925 892,96	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
61	Kedondong	1 198 935	0,10	36 918 820,41	1 300 345,82	38 309 169,22	3 070 648,83	10 925 892,96	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
62	Mura Atas	462 353	0,09	36 918 820,41	0,00	36 918 820,41	0,00	10 557 984,13	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
63	Harau	0	0,00	36 918 820,41	0,00	36 918 820,41	0,00	10 557 984,13	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
64	Keruing	0	0,00	36 918 820,41	86 780,68	37 005 401,09	47 476 804,53	10 557 984,13	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
Jumlah														
65	Jumlah Kcs. Tewel. Batu	97 396 519	2,43	406 107 024,49	51 450 111,15	459 457 135,94	119 137 825,38	15 256 977,89	131 304 803,27	522 244 849,88	68 607 089,03	570 861 938,91	359 511 106,35	296 340 775,39
VIII. Jumlah Kcs. Tewel. Sahan														
66	Buruk Batu	4 510 659	0,50	36 918 820,41	13 304 042,77	50 482 863,18	3 870 022,80	14 437 009,68	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
67	Sabuh	1 233 557	1,47	36 918 820,41	53 720 478,02	170 669 278,43	9 651 901,01	26 209 885,14	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
68	Hagak	4 224 730	5,28	36 918 820,41	120 960 163,14	157 878 963,55	1 578 961,94	45 146 968,84	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
69	Melawati	13 815 527	1,82	36 918 820,41	51 544 704,05	78 463 614,46	11 880 912,53	22 438 826,60	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
70	Sibu	19 095 598	2,51	36 918 820,41	57 422 452,27	54 341 272,68	10 557 984,13	26 079 692,50	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
71	Paran	1 713 857	0,23	36 918 820,41	5 153 754,02	42 072 575,03	16 431 802,87	12 031 816,48	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
72	Paran Bawah	4 880 241	0,63	36 918 820,41	14 434 817,26	42 810 907,73	4 187 581,02	14 808 282,27	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
Jumlah														
73	Jumlah Kcs. Tewel. Sahan	1 992 377	1,20	36 918 820,41	262 791 572,58	588 081 139,85	84 463 820,01	168 178 771,61	379 814 439,27	570 814 439,27	379 814 439,27	570 814 439,27	379 814 439,27	379 814 439,27
IX. Jumlah Kcs. Tewel. Sahan														
74	Buruk Batu	4 012 380	0,79	36 918 820,41	18 079 730,66	54 668 551,40	3 170 412,02	15 728 309,14	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
75	Buruk	45 027 192	0,90	36 918 820,41	117 416 102,05	173 535 162,40	39 268 101,67	40 856 082,80	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
76	Buruk Nunggul I	13 858 458	1,82	36 918 820,41	41 613 754,06	78 521 576,47	11 900 632,40	22 438 826,60	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
77	Buruk Nunggul II	17 781 000	2,04	36 918 820,41	53 469 421,50	60 388 241,61	15 301 607,08	25 816 052,11	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
78	Buruk Nunggul III	100 128 250	13,15	36 918 820,41	301 096 553,62	338 015 371,03	10 557 984,13	90 460 129,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
79	Buruk Nunggul IV	104 478 463	13,71	36 918 820,41	314 178 114,80	351 096 553,62	10 557 984,13	90 460 129,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
80	Buruk Nunggul V	43 681 029	5,74	36 918 820,41	111 353 601,57	196 272 421,98	10 557 984,13	90 460 129,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
81	Buruk Nunggul VI	43 681 029	5,74	36 918 820,41	111 353 601,57	196 272 421,98	10 557 984,13	90 460 129,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
82	Buruk Nunggul VII	43 681 029	5,74	36 918 820,41	111 353 601,57	196 272 421,98	10 557 984,13	90 460 129,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
Jumlah														
83	Jumlah Kcs. Jabat	30 806 417	0,86	36 918 820,41	19 745 173,14	50 663 626,55	5 656 602,45	16 404 676,58	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
84	Nibun Hilir	6 520 165	0,93	36 918 820,41	14 529 717,59	51 445 537,67	4 154 327,03	14 712 111,15	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
85	Nibun Hilir	4 820 792	0,63	36 918 820,41	2 854 431,56	39 772 252,36	1 816 305,80	11 664 478,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
86	Nibun Hilir	946 228	0,12	36 918 820,41	3 870 482,93	40 780 303,00	1 816 305,80	11 664 478,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
87	Nibun Hilir	1 287 111	0,17	36 918 820,41	3 870 482,93	40 780 303,00	1 816 305,80	11 664 478,53	47 476 804,53	45 581 946,73	47 476 804,53	28 486 083,72	18 970 721,81	18 970 721,81
88	Nibun Hilir	3 547 115	0,47	36 918 820,41	10 699 891,70	47 586 381,46	1 632 05 0							